

## **Analisis Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAP No 05 Tahun 2010 Pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat**

**Verawati Simanjuntak<sup>1\*</sup>, Hustianto Sudarwadi<sup>2</sup>, Desirianingsih H. Parastri<sup>3</sup>,**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi FEB, Universitas Papua, Manokwari

### **ABSTRACT**

*The Representative Office of the National Population and Family Planning Board (i.e. BKKBN) in West Papua is a government agency dedicated to managing population growth within the West Papua Province. At the BKKBN Representative Office, there are two types of supplies: office stationery for internal use and supplies distributed to the community. The aim of this research is to analyze the accounting standards at The National Population and Family Planning Board Representative Office of West Papua and evaluate their conformity with PSAP No. 05 of 2010 regarding inventory management at the West Papua Province BKKBN Representative Office. This research employs descriptive qualitative methods, utilizing data from the 2010 Financial Report and interviews. The results of this research include the classification of supplies at the West Papua Province BKKBN Representative Office, consisting of stationery and medicine supplies designated for distribution to the community. Inventory recognition at the West Papua Province BKKBN Representative Office occurs upon the arrival of goods at the warehouse. Inventory calculations follow the FIFO method. Expenses related to inventory usage are documented as inventory expenses in the Operational Report. Additionally, disclosures regarding damaged or defective goods are included in the notes to financial reports, and inventory measurement policies are also detailed within these notes. The inventory accounting procedures at the West Papua Province BKKBN Representative Office, including classification, recognition, measurement, inventory expenses, and disclosure, align with PSAP No. 05 regarding Inventory.*

**Keywords: PSAP 05, Inventory Accounting, BKKBN**

### **ABSTRAK**

Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua adalah instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan dalam menanggulangi meedaknya penduduk di Provinsi Papua Barat. Pada Kantor Perwakilan BKKBN terdapat dua jenis persediaan, yaitu Persediaan ATK dan Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan akuntansi persediaan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi persediaan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat dengan PSAP No. 05 Tahun 2010 tentang Persediaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data menggunakan Laporan Keuangan tahun 2010 dan wawancara. Hasil penelitian ini Klasifikasi persediaan pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat berupa persediaan ATK dan Persediaan Obat-obatan yang akan diserahkan ke masyarakat. Pengakuan persediaan pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat dapat diakui apabila barang sudah sampai di gudang. Perhitungan persediaan menggunakan metode FIFO. Untuk beban persediaan yang sudah digunakan dicatat sebagai beban persediaan pada Laporan Operasional. Sedangkan untuk pengungkapan pada untuk barang yang rusak atau cacat dicantumkan pada CaLK dan untk kebijakan pengukuran persediaan dicantumkan pada CaLK. Penerapan akuntansi persediaan pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat untuk Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Beban Persediaan, dan pengungkapan persediaan sudah sesuai dengan PSAP No.05 tentang Persediaan.

**Kata Kunci: PSAP 05, Akuntansi Persediaan, BKKBN**

---

\*Corresponding Author e-mail: v.simanjuntak@unipa.ac.id

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah berupaya menerapkan tata kelola yang efisien dengan cara memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara mereka berlangsung dengan transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Untuk mencapai *good government* pemerintah harus mengikuti kebijakan standar yang berlaku salah satunya Standar Akuntansi Pemerintah (Lalita, 2021).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah diakui dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang disusun berdasarkan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintah dengan berbasis akrual. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam lampiran PSAP No. 05 tentang Persediaan, yang bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat adalah badan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk yang cepat di Provinsi Papua Barat. Tugas utama mereka adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pengendalian pertumbuhan penduduk. Ini melibatkan kegiatan penyuluhan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mengendalikan pertumbuhan penduduk, termasuk penggunaan kontrasepsi seperti suntik KB dan alat kontrasepsi lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lalita (2021), juga menyatakan bahwa pada kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Riau untuk pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAP No. 05, namun dalam penyajian dan pengungkapan persediaan belum sesuai dengan PSAP No. 05. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2020), menyatakan bahwa pada BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk pengakuan dan pengukuran sudah sesuai sedangkan untuk pengungkapannya belum sesuai dengan PSAP No 05.

Penelitian ini mengambil sampel yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi persediaan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat dan; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi persediaan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat berdasarkan PSAP No. 05 Tahun 2010 tentang Persediaan.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Akuntansi Persediaan**

Libby (2007) mengungkapkan bahwa persediaan adalah aset lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan akan digunakan dalam kegiatan penjualan dalam operasional bisnisnya, baik sebagai produk yang dijual langsung atau sebagai komponen yang digunakan dalam produksi barang atau jasa yang akan dijual. Pada instansi pemerintah, persediaan merupakan barang yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Perhitungan persediaan mempunyai beberapa metode, yaitu FIFO (*First in First Out*) dan biaya rata-rata (*average*).

### **Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang khusus akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Bidang ini bermanfaat sebagai alat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pencatatan yang teratur tentang penerimaan dan pengeluaran dana. Tugas dan tanggung jawab akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi, baik untuk memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal dari organisasi (Else *et al.*, 2016).

### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 9 menyatakan bahwa pada waktu saat Peraturan Pemerintah ini dimulai maka PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan akuntansi pemerintah sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku (PP No. 71, 2010).

### **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05 Tahun 2010**

PSAP No. 05 Tahun 2010 tentang persediaan menjelaskan bahwa persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (PSAP 05, 2010).

#### **1. Klasifikasi Persediaan**

PSAP No. 05 Tahun 2010 tentang Persediaan digolongkan menjadi:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi.

- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan atau dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

## 2. Pengakuan

- a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikan dan/atau ke penguasaannya berpindah.
- c. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

## 3. Pengukuran

Nilai persediaan yaitu semua biaya yang telah dikeluarkan sampai barang tersebut bisa digunakan. Ada tiga cara untuk mengukur nilai persediaan yaitu:

- a. Biaya perolehan apabila produksi diperoleh dengan pembelian.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:

- a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang.
- b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

## 4. Beban Persediaan

- a. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- b. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
- c. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

- d. Dalam hal persediaan dicatat berdasarkan secara periodic, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

#### 5. Pengungkapan

Hal-hal yang dipandang perlu untuk digunakan dalam laporan keuangan dengan persediaan meliputi:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- c. Kondisi persediaan dengan keadaan rusak atau usang tak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Jenis metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk menganalisis dan membandingkan penerapan akuntansi persediaan yang terdapat pada Kantor Perwakilan BKKBN dengan PSAP 05 Tahun 2010 tentang Persediaan.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa laporan persediaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2021 pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2007), sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini sampelnya adalah laporan keuangan tahun 2021 pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat.

### **Teknik Analisis Data**

Berikut beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1. Pengumpulan data

Teknik pengambilan data primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui hasil wawancara pada bagian pengelola persediaan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Selain itu, data sekunder yang diambil dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahun 2021.

### 2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah data-data yang sudah ada di analisis berdasarkan klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang ada di kantor BKKBN Papua Barat. Kemudian dibandingkan dengan yang ada di PSAP No. 05.

### 3. Kesimpulan Pengumpulan Data

Terakhir menarik kesimpulan bahwa perlakuan persediaan di Kantor Perwakilan BKKBN Papua Barat sudah sesuai atau belum sesuai dengan PSAP No. 05 berdasarkan analisis data yang dilakukan.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi persediaan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat dan; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi persediaan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat berdasarkan PSAP No. 05 Tahun 2010 tentang Persediaan.

### **1. Klasifikasi Persediaan**

Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat dalam mengklasifikasikan persediaan yang sesuai dengan kriteria menurut PSAP 05 Tahun 2010 terdapat pada poin (a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional contohnya Alat Tulis Kantor (ATK), dan poin (d) barang yang digunakan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah contohnya pil KB, kondom, dll. Persediaan obat-obatan/alat kontrasepsi pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) yang berada pada kabupaten/kota yang ada di Papua Barat dan diserahkan kepada Fasilitas Kesehatan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka hasil analisis dari perlakuan akuntansi persediaan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Berikut tabel klasifikasi persediaan pada PSAP No. 05 Tahun 2010 tentang Persediaan dan klasifikasi persediaan yang ada pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat.

**Tabel 1. Klasifikasi Persediaan Berdasarkan PSAP No. 05 tentang Persediaan**

No	PSAP	BKKB	Keterangan
1	Persediaan merupakan aset yang berupa:	Persediaan di BKKBN Provinsi Papua Barat, yaitu:	Sesuai
	a. Barang atau perlengkapan ( <i>supplies</i> ) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.	a. aset lancar yang berupa barang atau perlengkapan ( <i>supplies</i> ) yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah berupa ATK (Alat Tulis Kantor).	
	b. Bahan atau perlengkapan ( <i>supplies</i> ) yang akan digunakan dalam proses produksi.		
	c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.	b. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat berupa obat-obatan KB, alat kontrasepsi, dll	
	d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.		

## 2. Pengakuan Persediaan

Persediaan yang ada pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat diperoleh dengan cara distribusi pusat, distribusi dinamis, dan beli sendiri. Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat persediaan diakui ada beberapa cara sesuai dengan dari mana persediaan itu berasal. Untuk distribusi dari pusat maupun dinamis persediaan diakui pada saat persediaan tersebut sudah sampai di gudang. Sedangkan untuk pembelian sendiri persediaan diakui pada saat barang sudah tersedia di gudang.

PSAP No 05 Tahun 2010 tentang Persediaan juga menjelaskan bahwa pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Untuk di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat pada akhir bulan akan melakukan *stock opname* pada persediaan untuk mengetahui saldo barang secara riil dengan cara memeriksa fisik barang persediaan di gudang. Berikut tabel pengakuan persediaan pada PSAP No. 05 Tahun 2010 tentang Persediaan dan pengakuan persediaan yang ada pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat.

**Tabel 2. Pengakuan Persediaan Berdasarkan PSAP No. 05 tentang Persediaan**

No	PSAP	BKKBN	Keterangan
1	<p>a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.</p> <p>b. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikan dan/atau ke penguasaannya berpindah.</p>	<p>Mengakui persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan obat-obatan pada saat barang benar-benar diterima.</p>	Sesuai
2	Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.	Melakukan <i>stock opname</i> setiap akhir periode pada 31 Desember	Sesuai

### 3. Pengukuran Persediaan

Pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat mengukur persediaan pada awal barang datang ke gudang sesuai dengan PSAP No.05 Tahun 2010 tentang Persediaan pada poin (a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dan poin (c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pada kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat untuk perhitungan persediaan pada saat barang keluar masuk ATK menggunakan metode FIFO. Sedangkan untuk obat-obatan menggunakan metode FEFO (*First Expired First Out*) merupakan metode perhitungan barang keluar yang memiliki masa kadaluarsa paling dekat terlebih dahulu. Berikut tabel pengukuran persediaan pada PSAP No. 05 Tahun 2010 tentang Persediaan dan pengukuran persediaan yang ada pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat.

**Tabel 3. Pengukuran Persediaan Berdasarkan PSAP No. 05 tentang Persediaan**

No	PSAP	BKKBN	Keterangan
1	<p>Persediaan disajikan sebesar:</p> <p>a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.</p> <p>b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.</p>	<p>1. Persediaan disajikan dengan biaya perolehan pada saat pembelian sendiri.</p> <p>2. Persediaan menggunakan nilai wajar apabila diperoleh dari pusat maupun dari sesama BKKBN.</p>	Sesuai



	c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.		
2	Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:	Menghitung persediaan dengan metode FIFO untuk Alat Tulis Kantor (ATK), sedangkan Untuk obat-obatan disebut dengan FEFO.	Sesuai
	a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang.		
	b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.		

#### 4. Beban Persediaan

Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat yang dianggap sebagai beban persediaan pada barang konsumsi kantor adalah persediaan ATK yang telah digunakan selama periode berjalan. Sedangkan untuk obat-obatan yang sudah diserahkan ke masyarakat dicatat pada beban barang yang diserahkan ke masyarakat pada laporan operasional. Untuk perhitungannya menggunakan perpetual dengan metode FIFO.

**Tabel 4. Beban Persediaan Konsumsi Kantor**

Uraian Jenis Beban	2020	2021
Beban Persediaan Konsumsi	Rp.55.777.000	Rp.813.708.000
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan		
Beban Persediaan Suku Cabang		
Beban Persediaan Lainnya		Rp.56.492.000
<b>Jumlah beban Persediaan</b>	<b>Rp.55.777.000</b>	<b>Rp.870.200.000</b>

Sumber: Laporan CaLK, 2021.

Tabel 4 di atas, untuk beban persediaan pada tahun 2020 sebesar Rp.55.777.000 dan naik pada tahun 2021 sebesar Rp.870.200.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

**Tabel 5. Beban Persediaan yang Diserahkan ke Masyarakat**

Uraian Jenis Beban	2020	2021
Beban Peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat		
Beban Barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp.2.540.171.007	Rp.3.948.638.419
<b>Jumlah</b>	Rp.2.540.171.007	Rp.3.948.638.419

Sumber: Laporan CaLK, 2021.

Tabel 5 di atas, untuk beban persediaan yang diserahkan kepada masyarakat pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.540.171.007 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.948.638.419. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan persediaan yang telah diserahkan kepada masyarakat sesuai metode yang digunakan dalam pengukuran persediaan. beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Berikut tabel beban persediaan pada PSAP No. 05 Tahun 2010 tentang persediaan dan beban persediaan yang ada pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat.

**Tabel 6. Beban Persediaan Berdasarkan PSAP No. 05 tentang Persediaan**

No	PSAP	BKKBN	Keterangan
1	Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.	Untuk persediaan yang sudah digunakan dicatat sebagai beban persediaan pada Laporan Operasional.	Sesuai
2	a. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual.	Menggunakan pencatatan perpetual.	Sesuai
	b. Dalam hal persediaan dicatat berdasarkan secara periodik.	Dimana setiap ada transaksi langsung dicatat.	

## 5. Pengungkapan Persediaan

Kantor perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat telah menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan pada CaLK. Namun dalam penjelasan mengenai pengukuran persediaan tidak disebutkan secara jelas metode yang digunakan untuk menghitung masuk dan keluarnya barang. Pada CaLK hanya mencantumkan awal penilaian persediaan tersebut diperoleh. Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat untuk akun persediaan terdapat pada Laporan keuangan bagian Neraca dan CaLK. Berikut nilai persediaan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat pada 31 Desember 2021.

**Tabel 7. CaLK Persediaan 2021**

Jenis	2020	2021
Barang Konsumsi		Rp.14.020.000
Barang Untuk Pemeliharaan		
Suku Cabang		
Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp.7.649.238.095	Rp.4.293.598.665
Total	Rp.7.649.238.095	Rp.4.307.618.665

Sumber: Laporan CaLK, 2021.

Pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat untuk jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak dan usang dijelaskan pada laporan CaLK. Pada tahun 2021 barang rusak dan usang tidak terdapat barang rusak atau usang. Berikut tabel analisis kesesuaian Pengungkapan Persediaan Berdasarkan PSAP No. 05 tentang Persediaan.

**Tabel 8. Pengungkapan Persediaan Berdasarkan PSAP No. 05 tentang Persediaan**

No	PSAP	BKKBN	Keterangan
1	Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.	Kebijakan akuntansi dalam mengakui persediaan sudah terdapat pada Catatan atas Laporan Keuangan,	Sesuai
2	Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.	Pada laporan persediaan dipisahkan antara barang konsumsi seperti ATK dengan persediaan yang diserahkan ke masyarakat, dan pada CaLK terdapat pengertian persediaan.	Sesuai
3	Kondisi persediaan dengan keadaan rusak atau usang tak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).	Barang kondisi rusak atau cacat diungkapkan dalam CaLK	Sesuai

## KESIMPULAN

Klasifikasi persediaan pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat berupa persediaan ATK dan Persediaan obat-obatan yang akan diserahkan ke masyarakat. Pengakuan persediaan pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat dapat diakui apabila barang sudah sampai di gudang. Hal ini sesuai dengan PSAP No. 05 tentang Persediaan, persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh permintaan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran persediaan pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat sudah sesuai dengan PSAP No. 05 tentang Persediaan, yang dimana perhitungan persediaan menggunakan metode FIFO. Untuk persediaan yang sudah digunakan dicatat sebagai beban persediaan pada Laporan Operasional. Sedangkan untuk pengungkapan pada untuk barang yang rusak atau cacat dicantumkan pada CaLK dan untuk kebijakan pengukuran persediaan dicantumkan pada CaLK.

Penerapan akuntansi persediaan pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat untuk Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Beban Persediaan, dan pengungkapan persediaan sudah sesuai dengan PSAP No.05 tentang Persediaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, A. D. (2019). *Perlakuan Akuntansi Persediaan Sesuai Dengan standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Kesehatan Kota Batu. UIN Malang.*
- Ayuningtyas, W. S. (2020). *Perlakuan Akuntansi Atas Persediaan Alat Kontrasepsi Berdasarkan PSAP No. 05 Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. STIE Perbanas Surabaya.*
- Dahlia, & Aliyah, M. (2021). *Penerapan Akuntansi Persediaan Obat-Obatan Berdasarkan PSAP No. 05 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene. Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) Vol.3 No. 2 April 2021, hlmn. 163-175.*
- Dewi. (2017). *Pengantar Akuntansi.* Bogor: In Media.
- Elsye, R., Suwanda, D., & Muchidin, U. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Haryono. (2012). *Dasar-Dasar Akuntansi.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan.* Bogor: IN MEDIA.
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.* Jakarta: Serikat Negara.
- Ismail, Y. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2021). *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Perindustrian Dan*

Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 16(3), 2021, 248-257.*

Lalita, A. (2021). Analisis Akuntansi Persediaan Berdasarkan Psap No 05 Tahun 2010 Pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau. *UIN SUSKA Riau.*

Mile, A. W., & Suwetja, I. G. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBud Kun, Vol. 5 No. 2 Januari-Juni 2022, halaman 323 - 328.*

Sugiyono, M. P. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Umboh , A. D., & Tinangon, J. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan Psap No. 5 Pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol.9 No 2 April 2021, Hal. 967-974.*